

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini akan membahas mengenai teori yang mendasari pada penelitian ini. Bab ini juga akan memaparkan tinjauan Pustaka yang merangkum mengenai studi empiris yang dilakukan pada penelitian sebelumnya.

2.1 Kerangka Teori

Kerangka teori menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan dalam mengkaji masalah dalam penelitian ini. Teori yang digunakan terdiri dari Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Modal Belanja, Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

2.1.1. Pembangunan Manusia

Konsep dalam pembangunan manusia yang dikemukakan oleh *United Nation Development Program (UNDP)* mencakup 4 komponen dasar yaitu kesetaraan memperoleh akses sumber daya ekonomi dan politik yang menjadi landasan atas hak dasar Negara. Produktivitas yang merupakan usaha yang bertujuan dalam meningkatkan kegiatan ekonomi. Pemberdayaan yang merupakan suatu upaya guna membangun kualitas sumber daya manusia dengan cara melakukan suatu perubahan kemampuan dan potensi dalam masyarakat. Berkelanjutan yang diartikan bahwa dalam mengelola modal pembangunan manusia, bisa dimanfaatkan pada periode dimasa yang akan datang. *Human Development Report* menjelaskan bahwa program pembangunan manusia merupakan suatu upaya yang tujuannya untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk, yang memiliki makna arti kebebasan diberikan kepada manusia dalam menentukan pilihan yang jauh lebih banyak sehingga tercapainya kebutuhan hidup yang lebih baik dalam menyikapi masalah ekonomi yang ada.

2.1.1.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) baik dari tingkat pendidikan, kesehatan serta ekonomi. Pembangunan yang berhasil tidak dapat diperoleh hanya dengan melihat pendapatan produk domestik bruto, melainkan juga adanya peningkatan pembangunan manusia. Oleh karena itu, Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah-satu indikator yang dapat mengukur keberhasilan suatu negara.

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indeks gabungan yang digunakan untuk mengukur pencapaian suatu negara dalam tiga dimensi mendasar, yaitu : (1) lamanya hidup yang diukur dengan harapan hidup pada saat lahir; (2) tingkat pendidikan yang diukur dengan kombinasi angka melek huruf pada orang dewasa (dengan rasio 2/3) dan rata-rata lama sekolah (dengan rasio 1/3); dan standar hidup yang layak, yang diukur dengan pengeluaran per kapita yang disesuaikan (PPP Rupiah). Indeks ini dikembangkan pada tahun 1990 yang dikemukakan oleh seorang ekonom Pakistan bernama Mahbub ul Haq. Perhitungan IPM dirumuskan sebagai berikut :

$$IPM = \frac{1}{3} (\text{Indeks X1} + \text{Indeks X2} + \text{Indeks X3})$$

Dimana :

X1 = lamanya hidup

X2 = Tingkat pendidikan

X3 = Tingkat kehidupan yang layak yang memakai indikator kemampuan daya beli

Dalam menghitung IPM, terlebih dahulu menghitung setiap komponen dari setiap indeksnya dengan formula perhitungan sebagai berikut :

Indeks =

Dimana :

= Indikator ke I dari daerah j

= Nilai minimum dari xi

= Nilai maksimum dari xi

Sebelum IPM dihitung, maka perlu dihitung masing-masing indeks dari 3 dimensi pembangunan manusia. Untuk menghitung indeks panjang usia, pendidikan, dan PDB, maka dipilih nilai minimum dan maksimum untuk masing-masing indikator. Nilai minimum dan maksimum dari komponen IPM antara lain sebagai berikut :

Tabel 2. 1
Nilai Minimum dan Maksimum Komponen IPM

Indikator Komponen	Nilai Minimum	Nilai Maksimum	Keterangan
Angka Harapan Hidup (Tahun)	25	85	Sesuai standar global (UNDP)
Angka Melek Huruf (Persen)	0	100	Sesuai standar global (UNDP)
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	0	15	Sesuai standar global (UNDP)
Daya beli (Rupiah PPP)	300.000	737.720	Pengeluaran per Kapita Rill disesuaikan

Sumber : BPS, Bappenas, UNDP 2021 diolah

Keterangan :

- a) Perkiraan maksimum pada akhir PJP II tahun 2018.
- b) Penyesuaian garis kemiskinan lama dengan garis kemiskinan baru.

Peforma ketiga perubahan tersebut dinyatakan sebagai suatu nilai antara 0 dan 1 berdasarkan rumus berikut :

$$\text{Indeks Dimensi} = \frac{\text{Nilai aktual} - \text{Nilai minimum}}{\text{Nilai maksimum} - \text{Nilai minimum}}$$

IPM kemudian dihitung sebagai rata-rata indeks-indeks dimensi ketiga perubahan tersebut. yang dirumuskan sebagai berikut :

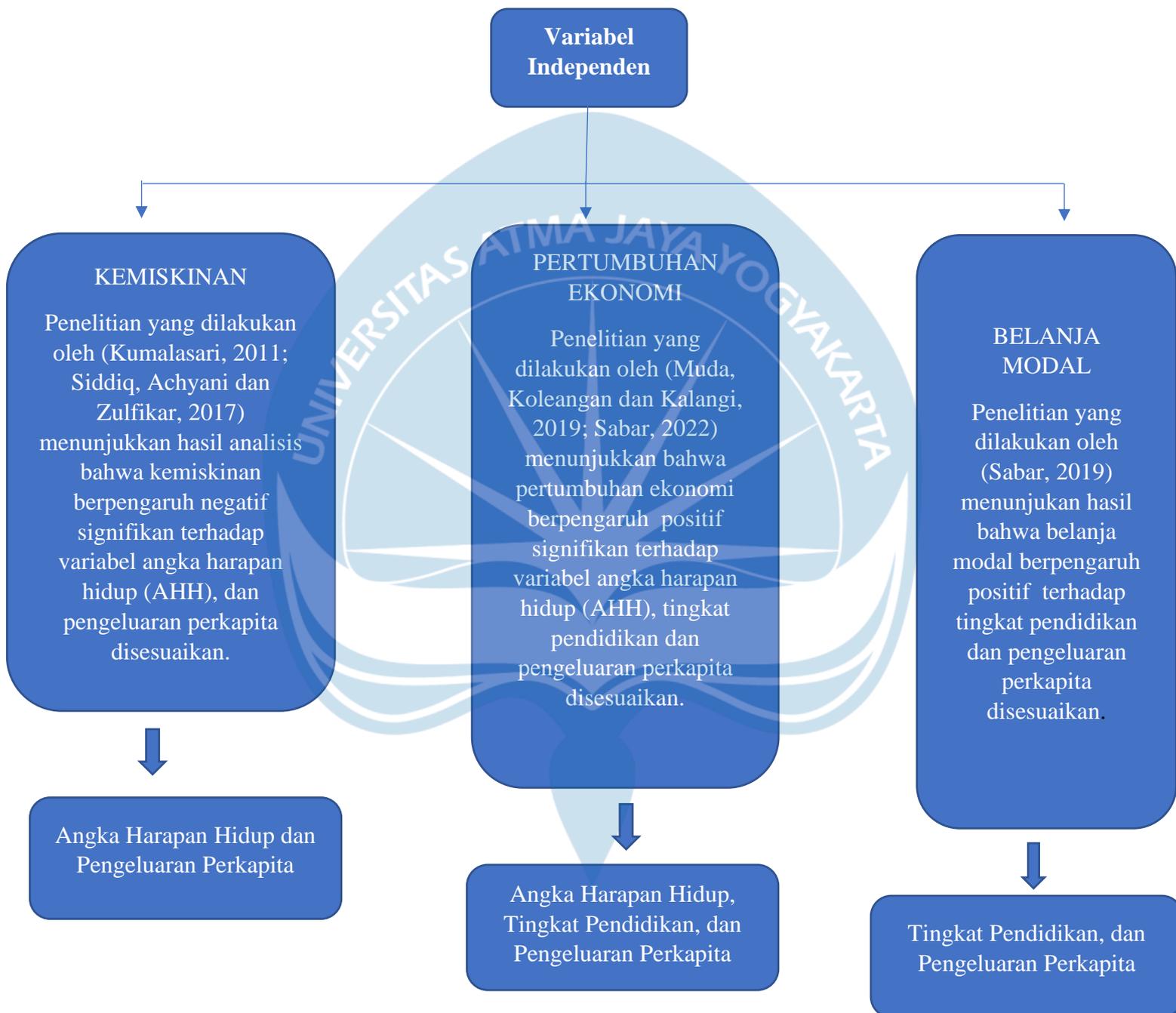
1. Indeks Pendidikan = $\frac{2}{3}$ (indeks melek huruf orang dewasa) = $\frac{1}{3}$ (indeks partisipasi kasar).
2. Indeks PDB = Indeks yang dihitung sebagai logaritma per kapita PDB (PPP US\$) yang disesuaikan penyesuaian dilakukan dengan pertimbangan bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan yang layak tidak dibutuhkan pendapatan yang tidak terbatas.

Dalam (*United Nations Development Programme-Regional Bureau for Arab States, 2002*) dijelaskan mengenai pembangunan sebagai sumber daya manusia yang dapat digunakan untuk mengembangkan kualitas masyarakat agar dapat membangun kemampuannya sendiri. Dalam proses dalam pembangunan ditegaskan bahwa manusia harus turut serta berpartisipasi dalam menjalankan setiap proses yang akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Dasar dalam penerapan Indeks Pembangunan Manusia ini dikarenakan melihat bahwa betapa pentingnya memperhatikan kualitas dari sumber daya manusia. Terdapat tiga golongan status pembangunan manusia yang berdasarkan dari nilai IPM yaitu : (1) $IPM < 50$ dikatakan rendah, (2) $50 \leq IPM < 80$ dikatakan menengah, (3) $IPM \geq 80$ dikatakan tinggi.

2.1.1.1.1. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan salah satu indikator dalam Indeks Pembangunan Manusia. Angka Harapan Hidup (AHH) digunakan untuk melihat perkiraan tahun rata-rata yang ditempuh setiap individu selama hidup. Angka Harapan Hidup (AHH) didefinisikan sebagai usia yang dapat dicapai oleh seseorang yang lahir pada tahun tertentu. Angka harapan hidup dihitung dengan menggunakan pendekatan tidak langsung (*indirect estimasi*). Saat menghitung angka harapan hidup (AHH), dua jenis data digunakan: anak lahir

hidup (ALH) dan anak masih hidup (AMH). Di sisi lain, indeks harapan hidup dihitung dengan menggunakan perhitungan harapan hidup maksimum menurut standar UNDP, dengan nilai maksimum 85 tahun dan minimum 25 tahun (standar UNDP).



Gambar 2. 1

Hubungan Variabel Independen Terhadap Indeks Angka Harapan, Indeks Tingkat Pendidikan, Indeks Pengeluaran Perkapita

2.1.1.1.2. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan indikator dalam menentukan Indeks Pembangunan Manusia. Sistem pendidikan Indonesia terdiri dari beberapa jenjang pendidikan. Tingkat pendidikan adalah proses yang sistematis dan terorganisir, proses jangka panjang menyediakan pengetahuan konseptual yang mana tenaga kerja manajerial mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan-tujuan umum. Tingkat pendidikan diukur dengan kombinasi angka melek huruf pada orang dewasa (dengan rasio 2/3) dan rata-rata lama sekolah (dengan rasio 1/3).

2.1.1.1.2.1. Angka Melek Huruf

Salah satu indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran pemerataan kesejahteraan sosial adalah dengan melihat proporsi penduduk yang melek huruf dan yang buta huruf. Angka melek huruf dapat dijadikan sebagai tolak ukur kemajuan suatu negara. Angka melek huruf (AMH) adalah rasio penduduk yang melek huruf di atas usia 15 tahun dengan penduduk di atas usia 15 tahun. Tingkat melek huruf memiliki batas atas 100 dan batas bawah 0 (standar UNDP). Ini mewakili 100 persen penduduk dunia mampu untuk membaca atau menulis, sedangkan nilai nol mewakili sebaliknya.

2.1.1.1.2.2. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah menunjukkan tingkat pendidikan masyarakat di wilayah tersebut. Semakin lama rata-rata lama sekolah, maka semakin tinggi pula jenjang pendidikannya. Secara umum diyakini bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pula kualitas seseorang, baik dari segi pola pikir maupun pola perilakunya. Menurut Atmanti (2005) berasumsi bahwa orang dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, yang diukur dengan masa sekolah, memiliki lebih banyak pekerjaan dan upah yang lebih baik daripada orang dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah. Rata-rata Lama Sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan dalam pendidikan formal apapun yang diikuti oleh

penduduk berusia 15 tahun ke atas. Rata-rata lama sekolah maksimal adalah 15 tahun dan minimal 0 tahun (standar UNDP). Batas usia 15 tahun menunjukkan bahwa jenjang pendidikan tertinggi yang layak adalah setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA).

2.1.1.1.3. Pengeluaran Perkapita Disesuaikan

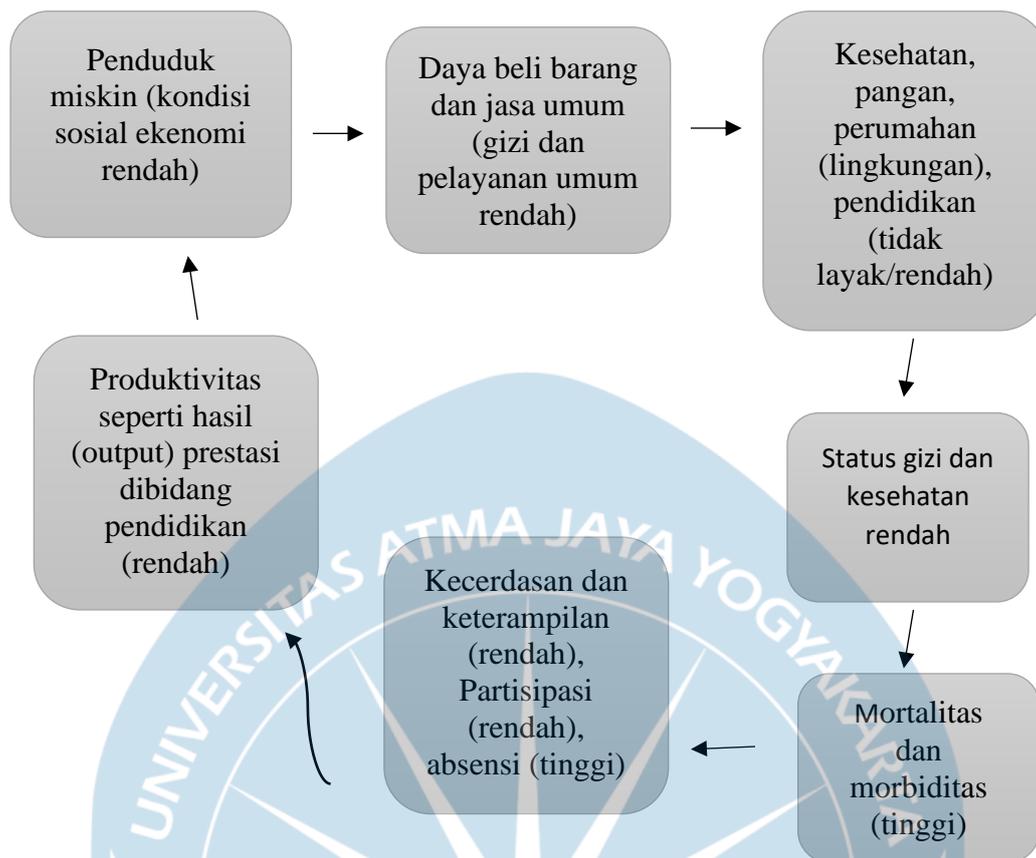
Standar hidup layak yang diukur dengan pengeluaran per kapita yang disesuaikan (PPP rupiah). Pengeluaran per kapita yang disesuaikan adalah pengeluaran per kapita yang disesuaikan dengan indeks harga konsumen dan penurunan utilitas marjinal. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan memberikan gambaran tentang tingkat daya beli masyarakat (PPP) dan merupakan salah satu faktor yang digunakan untuk mengkaji status pembangunan manusia suatu daerah. PPP (*purchasing power parity*) adalah harga riil antar negara bagian dan antar kabupaten/kota, dengan mempertimbangkan bahwa nilai tukar yang umum digunakan dapat meningkatkan atau menurunkan nilai daya beli terukur dari konsumsi per kapita yang disesuaikan. UNDP menggunakan produk domestik bruto riil yang disesuaikan untuk mengukur standar hidup yang layak, sedangkan BPS menggunakan indeks harga konsumen dan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan penurunan utilitas marjinal untuk mengukur standar hidup yang layak.

2.1.2. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana nilai pendapatan individu pertahun tidak dapat memenuhi kebutuhan yang bersifat pokok atau wajib, hal ini dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang kurang mampu dengan hidup yang tidak layak. Kemiskinan dapat dikenali dan memiliki pengertian yang sangat luas dalam menilainya.

Suradi (1980) mengatakan bahwa kemiskinan merupakan suatu keadaan yang menggambarkan ketidakberuntungan dan melarat, atau suatu keadaan yang mengalami kekurangan (*deprivation*). Hal ini tentunya berkaitan dengan kurangnya pendapatan dan

kekayaan, kelemahan fisik, kerapuhan dan ketidakberdayaan. Kemudian Amartya Sen dalam Suradi (1980) menjelaskan bahwa adanya inti kemiskinan yang absolut sepertinya mengalami kelaparan yang dapat menjadikan sebuah perspektif dari kemiskinan, serta ketidakmampuan dalam memenuhi tuntutan sosial dan ketidakmampuan dalam mendidik anak (pendidikan) dan menjaga kesehatan anak. Dalam arti luas, kemiskinan adalah suatu konsep terpadu yang memiliki lima dimensi yaitu kemiskinan, kerentanan menghadapi keadaan darurat ketidakberdayaan, serta keterasingan baik secara sosiologis maupun geografis. Kemiskinan absolut didefinisikan sebagai kondisi dimana masukan pendapatan penduduk atau rumah tangga tidak tercukupi dalam memenuhi kebutuhan pokok, pendapatan terlalu rendah sehingga tidak mampu untuk berpartisipasi dalam memenuhi kehidupan ekonomi dan sosial. Dalam melihat efek dari kebijakan guna mengatasi kemiskinan antar waktu atau memperhitungkan dampak yang diakibatkan dari kemiskinan, tentunya diperlukan garis kemiskinan untuk menilai. Bank Dunia memerlukan garis kemiskinan absolut untuk dapat membandingkan tingkat kemiskinan antar negara, dimana hal ini dapat bermanfaat untuk menentukan penyaluran sumber daya finansial (dana) yang ada agar tepat pada sasaran juga bermanfaat dalam menganalisis kemajuan dalam mengatasi kemiskinan. Dikutip dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa dalam menghitung tingkat kemiskinan terdiri dari dua pendekatan. (1) US \$ 1 perkapita per hari dimana diartikan bahwa terdapat sekitar 1,2 miliar penduduk dunia hidup dibawah garis tersebut. (2) US \$ 2 perkapita per hari dimana diartikan bahwa terdapat sekitar 2 miliar penduduk dunia hidup kurang dibawah garis tersebut. US dollar yang dimaksud adalah US \$ PPP (*Purchasing Power Parity*). Berikut ini pada Gambar 1.3 adalah bentuk perangkat kemiskinan yang dapat mempengaruhi dimensi satu dengan lainnya.



Sumber : Soebeno dalam Maiendra, 2009

Gambar 2. 2 Perangkat Kemiskinan (Poverty Trap)

2.1.3. Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Prihastuti (2018) mendefeniskan pertumbuhan ekonomi sebagai keadaan dimana terjadinya kenaikan pada output perkapita secara terus menerus dalam jangka waktu yang panjang dan merupakan salah-satu faktor yang menjadi indikator keberhasilan pembangunan suatu negara, daam hal ini semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka diartikan semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat. Sasana (2009) menjelaskan mengenai terdapat tiga faktor yang menjadi komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi pada setiap negara, antara lain sebagai berikut :

1. Akumulasi Modal, yang mencakup semua bentuk jenis investasi baru yang ditanamkan pada asset tanah, peralatan fisik, modal atau sumber daya manusia.

2. Pertumbuhan penduduk, dimana pada akhirnya berdampak pada banyaknya jumlah angkatan kerja.
3. Kemajuan teknologi, dimana terdapat cara baru dalam memperbaiki cara lama dalam menangani sebuah pekerjaan.

Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Pertumbuhan} = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

Berdasarkan pada model Solow-Swan menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital serta kemajuan teknologi dan output yang saling berinteraksi dalam proses pertumbuhan ekonomi (Chayani *et al.*, 2020). PDRB perkapita yang menjadi cerminan kemampuan rata-rata pendapatan penduduk dalam memenuhi kebutuhan pokok. Pemenuhan kebutuhan pokok merupakan sebuah indikasi yang menjelaskan tentang asal kesejahteraan melalui aspek pemerataan pendapatan masyarakat di suatu daerah.

2.1.4. Belanja Modal

Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan merupakan suatu alat sarana dalam menjalankan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, yang diartikan sebagai bentuk kebijakan Pemerintah Daerah. Dalam Undang-undang No.25 Tahun 1999 mengenai perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, APBD merupakan suatu upaya dalam menetapkan keuangan tahunan daerah yang berdasarkan pada peraturan daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD).

Belanja Daerah merupakan laporan pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan meliputi belanja rutin (operasional) dan belanja pembangunan (belanja modal) serta pengeluaran tidak terduga.

2.1.4.1. Peran Belanja Modal Terhadap Struktur Anggaran Daerah

Belanja daerah diutamakan untuk meningkatkan kualitas serta melindungi kehidupan masyarakat dalam memenuhi upaya kewajiban daerah yang diwujudkan dalam peningkatan pelayanan dasar, penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan, fasilitas umum dan sosial yang layak serta mengembangkan jaminan sosial dengan cara mempertimbangkan analisis standar harga, belanja, kinerja dan pelayanan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (UU 32 / 2004). Kewajiban tersebut telah tercatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dimana pengelolaan anggaran keuangan daerah dalam periode satu tahun dihitung mulai dari 1 Januari sampai pada 31 Desember.

Belanja modal dengan tujuan mendapatkan asset tetap pada pemerintah daerah yaitu peralatan, infrastruktur, bangunan, dan harta tetap lainnya. Terdapat tiga cara dalam memperoleh asset tetap yaitu dengan cara menurkarkan dengan asset tetap lain atau dengan membangun sendiri. Akan tetapi, upaya dyang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan cara membeli. Upaya pembelia yang dilakukan melalui dengan mengadakan proses lelang.

2.2. Hubungan Antar Variabel

2.2.1. Hubungan Kemiskinan dengan Indeks Pembangunan Manusia

Fenomena ekonomi yang terjadi seperti kemiskinan ini tidak mudah untuk didefenisikan, karena dalam kemiskinan terdapat unsur ruang dan waktu. Kemiskinan merupakan kondisi seseorang yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian yang layak, papan serta obat-obatan (Alhudhori, 2017). Menurut Bank Dunia dalam penelitian Maipita dan Fitrawaty (2014) mendefenisikan kemiskinan sebagai tidak memiliki tempat tinggal, sakit dan tidak memiliki kemampuan untuk berobat ke dokter, tidak memiliki kemampuan untuk baca tulis serta tidak mampu untuk membiayai pendidikan. Kemiskinan juga diartikan sebagai tidak memiliki pekerjaan yang mengakibatkan munculnya

rasa takut untuk berhadapan dengan masa depan. Sederhananya kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi seseorang yang berada dalam keadaan banyak kekurangan dari banyak aspek yang diukur dengan tingkat kesejahteraan.

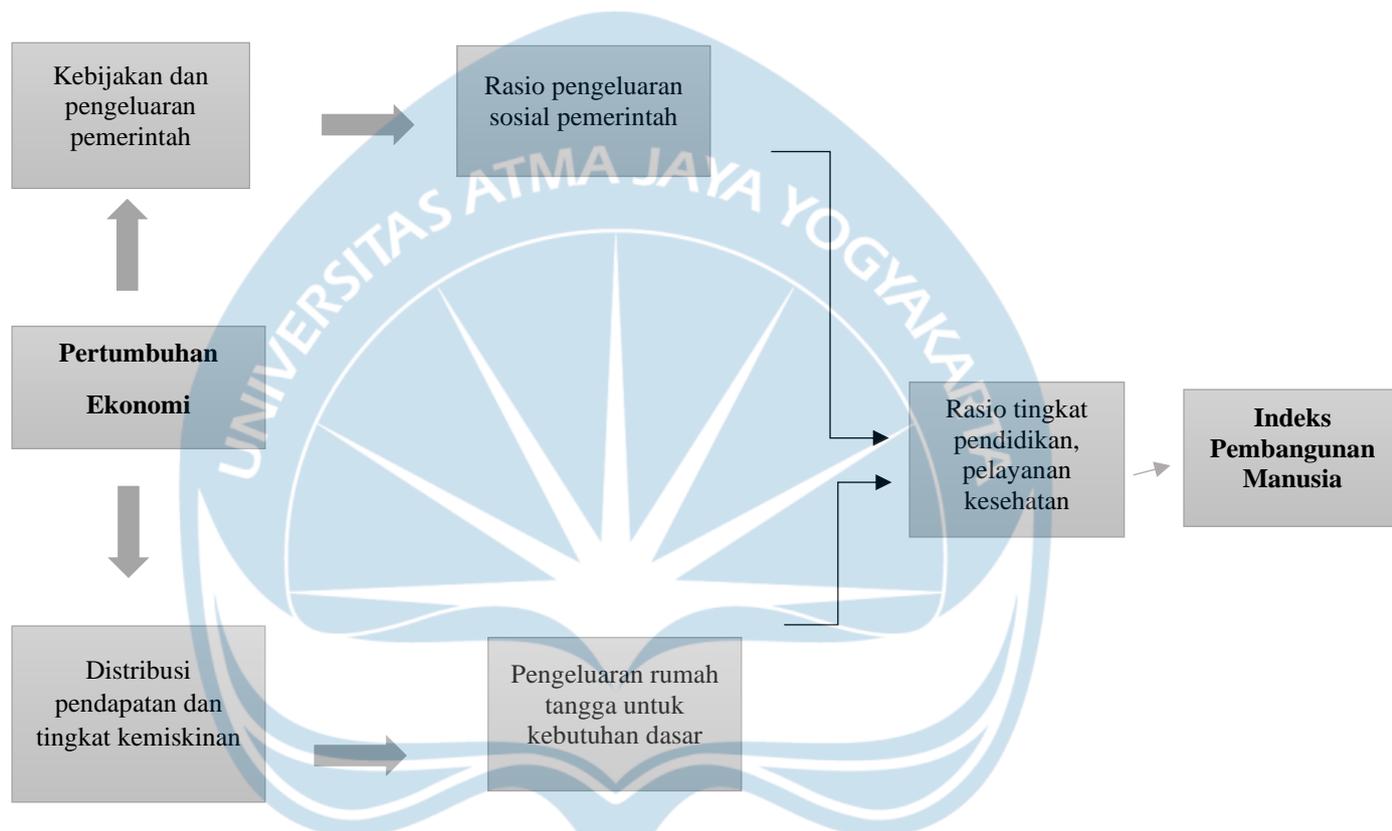
kemiskinan merupakan salah-satu faktor yang dapat menghambat dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Ginting (2008) menjelaskan mengenai adanya keterkaitan pembangunan manusia dengan pengurangan kemiskinan. Dalam hal ini, investasi dibidang pendidikan dan kesehatan dijadikan poin penting bagi masyarakat yang kurang mampu/miskin, karena pada dasarnya hasil tenaga kasar mereka yang akan menjadi asset utama.

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Kumalasari (2011) dan Siddiq (2017) menunjukkan hasil analisis bahwa kemiskinan berpengaruh negatif signifikan terhadap variabel angka harapan hidup (AHH), dan pengeluaran perkapita disesuaikan. Oleh karena itu, adanya fasilitas pendidikan dan kesehatan yang masih bisa dijangkau akan sangat berarti dan membantu guna meningkatkan produktifitas dan juga berdampak pada peningkatan pendapatan serta peningkatan kualitas SDM dalam pembangaun manusia.

2.2.2. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Indeks Pembangunan Manusia

Modal manusia (Human Capital) adalah faktor penting yang dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi. Dengan kualitas SDM yang baik, maka akan berdampak baik juga pada kinerja ekonomi seperti yang dikatakan Mubyarto dalam Mailendra (2009) "*sosial development is economic development*". Menurut Todaro (2018) mengatakan bahwa sumber daya manusia dari suatu bangsa merupakan indikator yang paling berperan dalam menentukan karakter dan kecepatan pembangunan ekonomi dan sosial dari negara yang bersangkutan.

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Muda (2019) dan Sabar (2022) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap variabel angka harapan hidup (AHH), tingkat pendidikan dan pengeluaran perkapita disesuaikan. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan manusia dapat dijelaskan dengan dua jalur seperti dapat dilihat pada Gambar 2.2



Sumber : Soebeno dalam Maiendra, (2009)

Gambar 2. 3 Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Pembangunan Manusia

2.2.3 Hubungan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Belanja daerah merupakan kewajiban suatu daerah sebagai bentuk nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan yang tertulis dalam UU Nomor 33 Tahun 2004. Hal ini tentunya memiliki fungsi yang terdiri dari belanja yang ditujukan untuk membangun infrastruktur atau fasilitas umum, peningkatan kesehatan, pendidikan, pariwisata, budaya, agama, serta perlindungan sosial,

Berdasarkan pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 mengenai perubahan kedua, Belanja Daerah diklasifikasikan menjadi 2 kelompok, yaitu :

1. Belanja Langsung, dimana anggaran belanja terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Belanja langsung terdiri dari belanja barang dan jasa, belanja modal dan belanja pegawai.
2. Belanja tidak langsung, dimana anggaran belanja tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung juga diartikan sebagai anggaran daerah yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerahnya untuk pembangunan dalam kesehatan, pendidikan serta infrastruktur lainnya.

Amelia (2020) menjelaskan dalam penelitiannya mengenai pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia, pemerintah selaku pelaksana pembangunan nasional tentunya akan membutuhkan modal dasar guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Oleh karena itu, pemerintah akan melakukan adanya pengeluaran dan investasi yang tidak sedikit guna melaksanakan proses pembangunan. Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Sabar (2019) menunjukkan hasil bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap tingkat pendidikan dan pengeluaran perkapita disesuaikan.

Saat ini pemerintah mengambil kebijakan yang tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar terjapai kemakmuran dan kesejahteraan, untuk itu pemerintah mengalokasikan sebagian dana yang ada kedalam bentuk belanja modal. Sehingga dengan adanya belanja modal diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar yang memerlukan fasilitas pelayanan publik yang lebih baik.

2.3 Studi Terkait

Studi terkait merupakan rangkuman penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti lain, baik dalam bentuk artikel jurnal ilmiah ataupun skripsi mengenai “Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sumatera Utara : Bukti Data Panel Tahun 2010-2021”. Penelitian ini memakai metode data panel sebagai alat analisis yaitu gabungan data time series dan cross section. Data time series terdapat pada periode tahun 2010-2021 sedangkan data cross section yaitu 34 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.

Pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Khikmah *et al* (2020) penelitian yang berjudul “*The Influence Of Poverty, Economic Growth And Capital Shopping On HDI In Sulawesi Island 2011-2018*”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan belanja modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada provinsi di Pulau Sulawesi tahun 2011-2018. Penelitian menggunakan regresi data panel dengan *Random effect model* sebagai alat analisis. Penelitian ini mendapatkan hasil analisis bahwa kemiskinan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi di Pulau Sulawesi, pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi di Pulau Sulawesi, belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi di Pulau Sulawesi. Kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan belanja modal secara bersama memiliki pengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada provinsi di Pulau Sulawesi tahun 2011-2018.

Selanjutnya, penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Hasan (2021) dengan judul penelitian “*The Effect Of Economic Growth, Foreign Investment, And Human Development Index On Poverty In Indonesia*”. Alat analisis pada penelitian ini adalah regresi linier berganda

dengan menggunakan data panel dari 34 provinsi yang ada di Indonesia pada periode tahun 2010-2019. Hasil yang didapatkan pada penelitian ini bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, penanaman modal asing, dan Indeks Pembangunan Manusia secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Penanaman modal asing berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembangunan manusia di Indonesia. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Variabel Investasi memiliki pengaruh paling besar terhadap kemiskinan di Indonesia.

Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Komang *et al* (2021) dengan penelitian yang berjudul “*Unemployment effect on economic growth and poverty levels (a case study in bali)*”. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data panel sebagai alat analisis dan memakai 45 data observasi Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa Indeks Pembangunan Manusia dan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali, sedangkan tingkat pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Indeks Pembangunan Manusia dan investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali, sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Pertumbuhan ekonomi menjadi penengah terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Hobrouw *et al* (2021) yang berjudul “Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Tengah Tahun 2006-2009. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel dengan memakai data dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah periode tahun 2006-2009. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan IPM mengalami

peningkatan dengan kategori IPM menengah pada periode tahun 2006-2009, sedangkan hasil yang didapat dari regresi panel menunjukkan bahwa kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.

Selanjutnya penelitian yang telah dilakukan oleh Ningrum *et al* (2020) dengan judul penelitian mengenai “Pengaruh Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia Tahun 2014-2018 dalam Perspektif Islam”. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan memakai data dari 34 Provinsi di Indonesia dengan periode tahun 2014-2018. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kemiskinan dan tingkat pengangguran berpengaruh signifikan terhadap IPM yang ditunjukkan dengan nilai probabilitas lebih kecil dari nilai alpha (0,05), sedangkan pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM ditunjukkan dengan nilai probabilitas lebih besar dari nilai alpha (0,05). Secara simultan semua variabel berpengaruh signifikan terhadap IPM dan pengaruh yang ditunjukkan sebesar 80,78% menunjukkan variabel kemiskinan, tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah dapat menjelaskan variabel Y, sisanya 19,22% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel penelitian.